

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Baru/Berulang (PIB) dan Zoonosis



RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak tahun 2015, pemerintah melalui UU No. 6/2014 tentang Desa telah mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk mempercepat pembangunan desa serta mengatasi kesenjangan antara desa dan kota. Dana Desa dapat dipergunakan untuk membangun infrastruktur, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa.

Pertumbuhan populasi, globalisasi dan beragam faktor lainnya menyebabkan Penyakit Infeksi Baru/Berulang (PIB) dan penyakit zoonotik (penyakit yang dapat ditularkan melalui hewan kepada manusia dan sebaliknya) dapat menyebar dengan lebih cepat, termasuk dalam bidang peternakan. Penggunaan dana desa secara optimal dapat berkontribusi untuk mengatasi kendala anggaran yang dihadapi oleh kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Dinas di Provinsi/Kabupaten dalam menerapkan kegiatan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB yang akan berdampak positif bagi kesehatan. Pendekatan ini akan memperkuat penerapan kegiatan yang termasuk dalam Instruksi Presiden No. 4/2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia.

Pada tahun 2018, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

(Kemendesa PDTT) dan Badan Pangan Dunia PBB (FAO) mendorong pemerintah desa di kabupaten percontohan untuk menggunakan dana desa dalam mendukung pengendalian penyakit di tingkat desa dengan penerapan *One Health* (OH). Pada tahun 2019, sebagai hasil dari inisiatif ini, 3 desa di Kabupaten Ketapang, 6 desa di Kabupaten Boyolali, 11 desa di Kabupaten Bengkalis, dan 12 desa di Kabupaten Minahasa telah mengalokasikan Rp. 7.000.000, Rp. 11.000.000, Rp. 15.000.000, dan Rp 23.500.000 untuk mendukung penerapan OH. Sejak tahun 2015, Dinas Kesehatan telah menggunakan dana desa untuk beragam kegiatan yang melibatkan kader kesehatan desa. Petugas kesehatan masyarakat, petugas kesehatan hewan dan petugas kesehatan satwa liar di Kabupaten Ketapang, Bengkalis, Minahasa dan Boyolali kini bekerja sama dengan masyarakat untuk mencegah, mendeteksi dan merespon penyakit zoonotik.

Pencegahan, pengendalian dan respon terhadap wabah zoonosis memerlukan adanya koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dari segenap pemangku kepentingan. Saat ini, pengendalian penyakit yang melibatkan multisektor kurang optimal pelaksanaannya, **namun dana desa dapat digunakan untuk mendukung penerapan *One Health* di lapangan**. Kementan, bersama dengan Kemendesa PDTT dan FAO meningkatkan kesadaran adanya peluang untuk menggunakan anggaran desa dalam mengatasi kendala anggaran yang dihadapi kementerian teknis dan dinas di Provinsi/Kabupaten untuk pencegahan dan pengendalian penyakit dalam meningkatkan kesehatan.



Sosialisasi pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan pengendalian PIB dan zoonosis tertarget di Boyolali, Jawa Tengah. © FAO/Gayatri Kancana

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, munculnya atau berulangnya penyakit infeksi terjadi dengan semakin cepat. Diperkirakan bahwa secara global, 5 penyakit infeksi baru akan muncul tiap tahunnya, 3 diantaranya bersifat zoonosis. Wabah ebola baru-baru ini dan tingginya angka kematian manusia yang disebabkan oleh rabies tiap tahunnya mengingatkan kita akan kuatnya hubungan antara kesehatan manusia, hewan-satwa liar dan lingkungan. Strategi pengendalian penyakit secara multisektor yang efektif diperlukan dan dapat diterapkan menggunakan pendekatan OH.

Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah bekerja sama dengan FAO ECTAD Indonesia dalam membangun kemampuan untuk melaksanakan deteksi dini dan respon cepat terhadap penyakit zoonotik dan PIB menggunakan pendekatan OH. Program percontohan telah dilakukan di 4 kabupaten di Indonesia, yakni: Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat; Bengkalis, Provinsi Riau; Boyolali, Provinsi Jawa Tengah; dan Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Penyakit zoonotik yang diprioritaskan selama

pelaksanaan program ini mencakup avian influenza (flu burung), rabies, dan antraks.

Pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB secara efektif dan efisien mengharuskan adanya kolaborasi yang aktif dengan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting sebagai pemangku kepentingan dalam upaya untuk deteksi dini dan pelaporan dini terkait zoonosis dan PIB. Selain itu, di Indonesia dan wilayah lainnya, keterlibatan masyarakat sangatlah penting untuk memastikan keberhasilan penerapan dan keberlanjutan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit. Memastikan kecukupan dana operasional bagi kader desa yang merupakan bagian dari masyarakat adalah kunci keberhasilan program ini.

Pada tahun 2014, pemerintah pusat meluncurkan sebuah program dana desa agar desa mampu mendanai pembangunan mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Hal ini memberikan kesempatan untuk mendanai anggota masyarakat dan petugas lapangan untuk meningkatkan surveilans dalam mendukung deteksi dini dan pelaporan dini sebagai bagian yang terintegrasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit zoonotik dan PIB.

PENGUNAAN DANA DESA PADA DAERAH PERCONTOHAN PENERAPAN *ONE HEALTH* PADA TAHUN 2019

Bengkalis

Ketapang

Minahasa

Boyolali



11 Desa



3 Desa

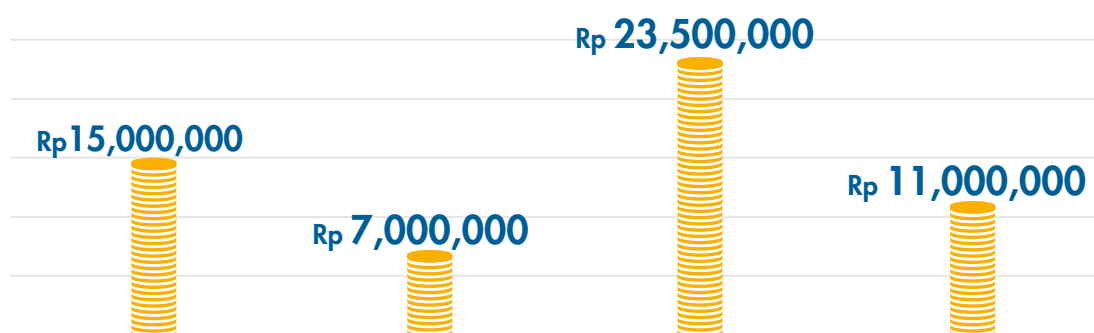


12 Desa

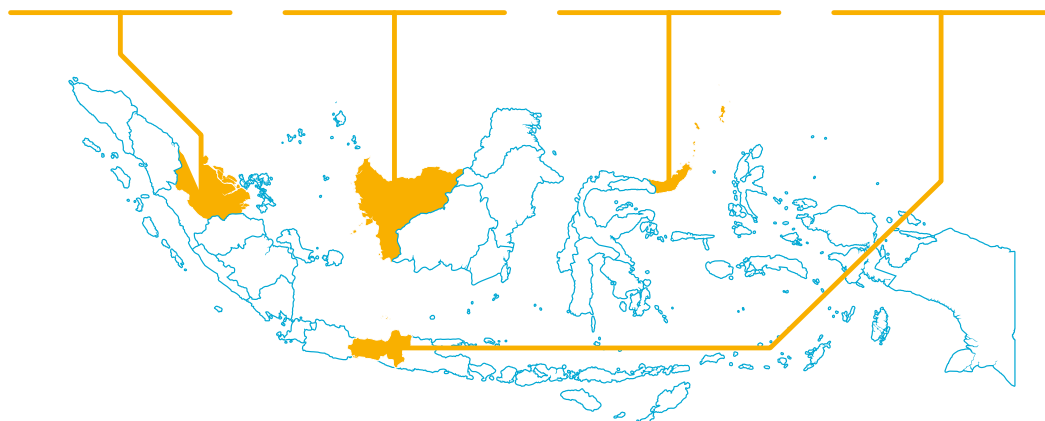


6 Desa

TOTAL ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK PENERAPAN OH



TOTAL ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK KESEHATAN HEWAN





Kegiatan KIE di Desa Kauneran, Kec. Sonder, Kabupaten Minahasa.
© Dinas Kesehatan Hewan Minahasa

KENDALA

- Keterbatasan anggaran pada kementerian teknis dan dinas Provinsi/Kabupaten untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonotik dan PIB yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan hewan. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Minahasa, Ketapang dan Boyolali masing-masing hanya mengalokasikan anggaran kesehatan hewan pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.625.500.000, Rp. 415.000.000, Rp. 1.087.979.200 dan Rp. 1.162.055.000. Anggaran ini digunakan terutama untuk program gangguan produksi/reproduksi dan kegiatan vaksinasi terhadap penyakit non-zoonotik, dana yang minim dialokasikan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit zoonotik atau penerapan pendekatan OH, hal ini sangat berbeda dengan anggaran yang dialokasikan oleh sektor kesehatan masyarakat.
- Komitmen/kebijakan para pemangku kepentingan dalam penerapan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit zoonotik perlu dioptimalkan dan ditunjukkan melalui
 - » Peraturan-perundangan
 - » Alokasi anggaran yang memadai
 - » Sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas
 - » Keberlanjutan
- Masyarakat/kader dan perangkat desa perlu terlibat dalam deteksi dini dan pelaporan dini untuk mencegah dan mengendalikan penyakit zoonotik dan PIB.

REKOMENDASI

- Kementerian Dalam Negeri mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk menggunakan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kader desa untuk mendukung kesiapsiagaan dan respon terhadap zoonosis dan PIB dari sisi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat,
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memasukkan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB sebagai bagian dari layanan sosial dasar dan sebagai sebuah prioritas dalam penggunaan dana desa.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama dengan Pemerintah Daerah perlu menggalakkan dan mengadvokasi kepada kepala desa mengenai pentingnya mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB untuk meningkatkan kesehatan.
- Kementerian Pertanian secara aktif mendorong Dinas yang membidangi Kesehatan Hewan di Pemerintah Daerah untuk menerapkan "Panduan Praktis Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru/Berulang (PIB) melalui Optimalisasi Fungsi Puskesmas dengan Dukungan Dana Desa".
- Kementerian Kesehatan mendorong Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah untuk menerapkan "Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Bidang Kesehatan".

The FAO Emergency Center for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian untuk mengimplementasikan zoonosis dan program pencegahan, deteksi dan respons penyakit menular yang muncul di Indonesia. Program ini didanai oleh the United States Agency for International Development (USAID).



www.fao.org/indonesia/en/



FAOIndonesia



Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



USAID
DARI RAKYAT AMERIKA